



**PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

2025

RENCANA KERJA **PERUBAHAN**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Bhayangkara Baru Nomor 1, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685677, Faksimile (0291) 68191,
Laman dinlh.demakkab.go.id, Pos-el lingkhdiup.demak@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025 merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu pada Perubahan Renstra dan Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025. Diharapkan perubahan Renja Tahun 2025 dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Demak, April 2025
Pjt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Demak

Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196809031993022001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum..... 4

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 9

 1.4 Sistematika Penulisan..... 10

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025. 11

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak..... 11

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup..... 28

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 30

 2.4 Review terhadap Renja 2025 33

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 49

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 52

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 52

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 54

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK..... 57

 4.1 Program dan Kegiatan 57

 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan..... 57

 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan 57

 4.2 Program Prioritas dan Rencana Implementasi..... 75

BAB V. PENUTUP 87

 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian..... 87

 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan. 87

 5.3 Rencana tindak lanjut..... 88

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;

- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja dimulai dengan melakukan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun berjalan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJMN. RPJMD sebagai pedoman didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Bersamaan dengan proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan setiap tahun juga menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

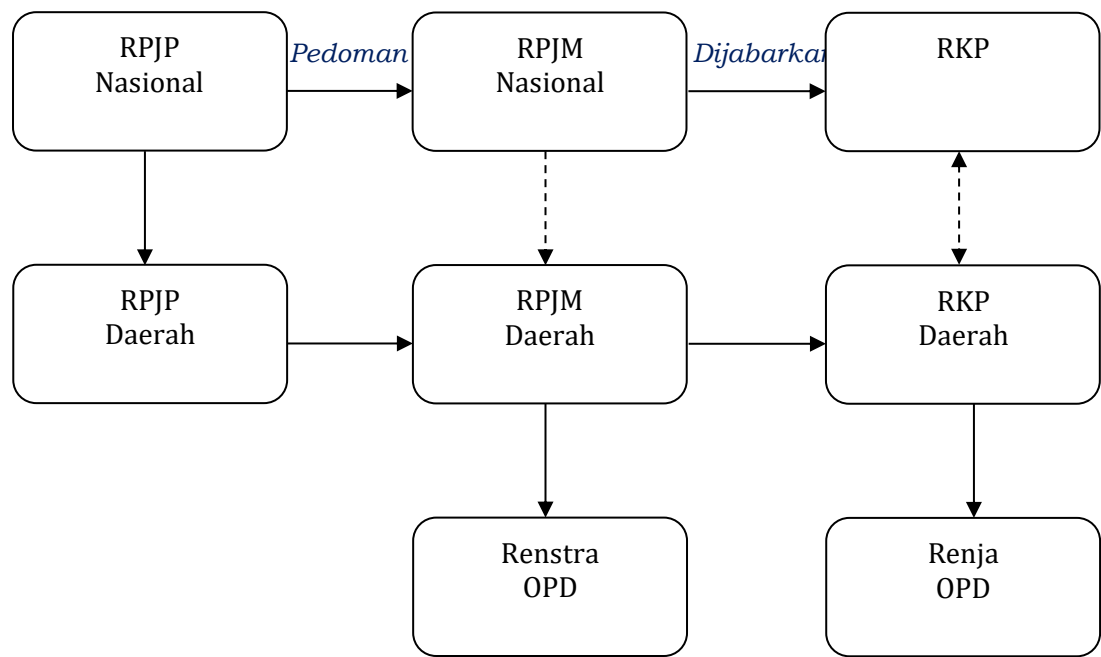
Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah menggambarkan Tujuan Jangka Panjang, Strategis-strategis, Sasaran Tahunan dan Indikator Kinerja Sasaran. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja dari organisasi dan kerangka acuan untuk Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan. Rencana strategis merupakan pedoman Umum dan Jangka Panjang, sedangkan Rencana Kinerja merupakan dokumen yang lebih detail dan terfokus setiap tahun anggaran.

Penyusunan Rencana Strategis dan Perubahan Rencana Kerja tidak terlepas dari system penganggaran dari suatu unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan Sasaran dan Tujuan serta strategi

pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran dan ketersediaan anggaran.

Dalam pelaksanaan Renja tahun 2025, terdapat dinamika dan perubahan baik dari aspek regulasi, kebijakan nasional maupun daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berjalan. Sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tahun 2025. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran kinerja, menyesuaikan dengan alokasi anggaran terbaru serta mengakomodasi program prioritas yang ditetapkan dalam kebijakan daerah. Dengan demikian, dokumen perubahan ini menjadi instrument penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kebutuhan organisasi dan arah pembangunan sumber daya aparatur di Kabupaten Demak.

Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

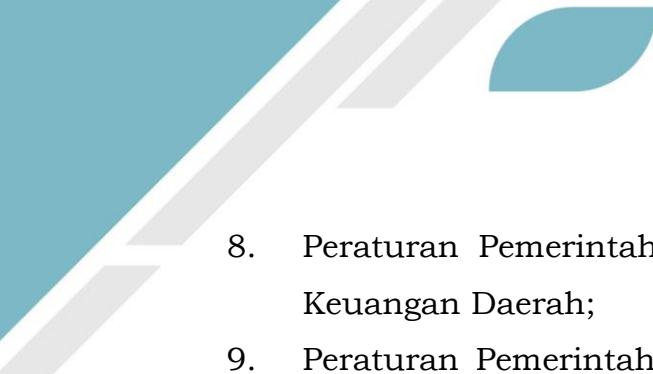


Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) 2025 terjadi dalam konteks transisi perencanaan pembangunan, terutama karena pergantian kepemimpinan daerah hasil pemilu 2024 dan penyusunan RPJM Daerah 2025-2029 yang baru belum sepenuhnya final. Hal ini menimbulkan potensi adanya ketidakselarasan perencanaan sebagai dampak perubahan prioritas pembangunan menyesuaikan visi misi baru yang mungkin berbeda dengan rencana sebelumnya. Untukantisipasi dampak yang terjadi bahwa perubahan renja disusun dengan pendekatan perencanaan yang dinamis dan flexibel, dimana dilakukan pembaharuan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan, kondisi aktual atau prioritas baru.

1.2 Landasan Hukum

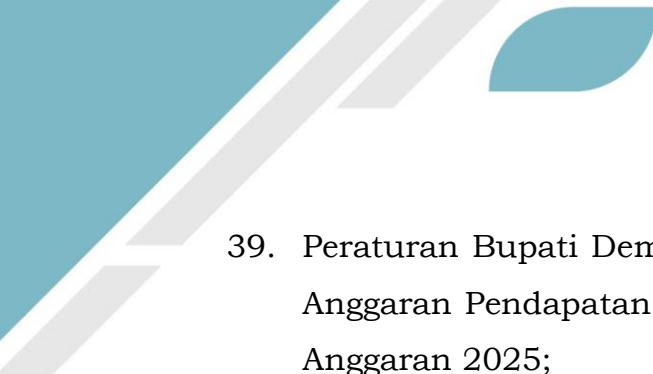
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara

- Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan ;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2021 tentang Data Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam;
 24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
 34. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
 35. Peraturan Bupati Demak Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak;
 36. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
 37. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
 38. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;

- 
39. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
 40. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
 41. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 42. Surat Edaran Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Serta Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 1 (satu) tahun berjalan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran.

1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tahun 2025 adalah menjadikan dasar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tahun 2025 juga dimaksudkan untuk penyesuaian kebijakan dan target Perangkat Daerah serta kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dengan tujuan:

- a. Sebagai acuan penyusunan perubahan dokumen perencanaan jangka pendek tahunan;
- b. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan Renstra Dinas dan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021 - 2026;
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Menguraikan tentang kondisi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja 2025.
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Memuat tentang tujuan dan sasaran beserta target kinerja Perangkat Daerah
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025 beserta kerangka pendanaannya.
BAB V	Penutup Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak melaksanakan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dengan tujuan pertama Meningkatkan pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup dengan sasaran pertama Terwujudnya pelayanan public yang responsive, tujuan kedua meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan sasaran kedua meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup, tujuan ketiga meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran ketiga terdapat 3 sasaran yaitu Menurunnya Pencemaran Udara, Meningkatnya Luas Tutupan Lahan (LTH) dan Menurunnya Pencemaran Air Permukaan. Program dan Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak pada tahun 2025 bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Pajak Air Tanah, yaitu APBD.

Pada tahun 2025 anggaran murni Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp25.225.208.300,00 setelah penyesuaian efisiensi belanja daerah menjadi Rp24.914.088.300,00 pengurangan sebesar Rp311.120.000,00. setelah perubahan terdapat peningkatan anggaran sebesar Rp329.865.724,00 sehingga anggaran perubahan menjadi sebesar Rp25.243.954.024,00 anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Demak. Adapun rincian penambahan anggaran dimaksud, pada gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berkurang sebesar Rp948.384.276,00, kemudian penambahan anggaran usulan pemangku kepentingan Rp300.000.000,00, pagu prioritas untuk Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (KLHS RTRW) Rp200.000.000,00, Pendampingan dan pembahasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (KLHS RTRW) Rp100.000.000,00, penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang

(KLHS RDTR) Kecamatan Guntur Rp100.000.000,00. Sedangkan penambahan Pagu OPD Rp578.250.000 dengan rincian sebagai berikut, Penyusunan Dokumen Indesk Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dokumen Inventarisir Gas Rumah Kaca (GRK) dan Database Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp120.000.000,00, Pengelolaan ruang terbuka hijau Rp100.000.000,00 Perjalanan Dinas Rp7.000.000,00 dan Pengelolaan Persampahan Rp351.250.000,00.

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat itu sekaligus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Evaluasi didasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup mengampu 1 (satu) urusan yaitu urusan bidang lingkungan hidup yang terbagi dalam 7 (tujuh) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7. Program Pengelolaan Persampahan

Kemudian terbagi dalam 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5. Administrasi Umum Perangkat daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

- d. Pemeliharaan Mebel
- e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

- 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

D. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

- 1. Penyimpanan sementara Limbah B3
 - a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

F. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

G. Program Pengelolaan Persampahan

1. Pengelolaan Sampah
 - a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - b. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Adapun hubungan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak sampai dengan semester I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 4.149.824.839,- dari total pagu APBD sebesar Rp 24.914.088.300,- atau 16,66% Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah terealisasi sebesar Rp 3.290.819.697,- dari total pagu Rp 17.426.743.300,- atau 18,88%. Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah terlaksana dengan baik dan sesuai time schedule. Namun masih ada kegiatan yang tingkat capaiannya belum maksimal, yaitu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan I namun karena proses pengadaan melalui e-katalog masih terkendala sehingga sampai bulan April belum terlaksana.

Untuk Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup telah terealisasi sebesar Rp 4.740.000 atau sekitar 0,80% dari pagu Rp. 591.425.000,- hal ini dikarenakan proses penyusunan buku dan uji kualitas air kualitas udara dan laut belum berjalan, dan untuk kegiatan bersih- bersih Sungai (Prokasih) juga dalam prsoses pengadaan barang dan jasa.

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan pagu Rp. 2.431.925.000,- terealisasi sebesar Rp. 134.510.000,- atau 5,29% dan beberapa pekerjaan juga dalam proses pengadaan barang dan jasa. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan pagu Rp. 44.805.800,- telah terealisasi Rp 6.900.000,- (15,40%), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pagu Rp. 68.080.000,- terealisasi Rp 23.314.292,- (34,25%), Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Pagu Rp 35.810.000,- terealisasi Rp 10.351.850,- (28,91%). Dan untuk Program Pengelolaan Persampahan dengan pagu Rp. 4.205.539.200,- terealisasi sebesar Rp 679.189.000,- (18%) dimana dalam program ini terdapat usulan - usulan aspirasi dan Masyarakat yang sedang dalam proses pengadan Barang dan Jasa.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 TW 1
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Lembar :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)	Perkiraan realisasi capaian Target Rensstra s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2025(%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	9	9	9	0	0%	9	9	100%
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	0	0%	3	3	100%
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	0	0%	1	1	100%
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	0	0%	1	1	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)	Perkiraan realisasi capaian Target Rensstra s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2025(%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	0	0%	4	4	100%
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	88	100	100	100%	100	100	100%
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	1	1	1	0	0%	1	1	100%
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	0	0%	1	1	100%
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	275	275	270	246	91%	246	246	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)	Perkiraan realisasi capaian Target Rensstra s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2025(%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	20	20	10	50%	20	20	100%
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	30	30	10	33%	30	30	100%
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	25	25	15	60%	25	25	100%
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	1	25%	4	4	100%
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	3	3	1	33%	3	3	100%
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	10	5	5	100%	5	5	100%
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Dengan satuan: Laporan)	190	350	200	30	15%	190	190	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)	Perkiraan realisasi capaian Target Rensstra s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2025(%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2	2	0	0%	2	2	100%
2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	2	2	1	50%	2	2	100%
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	11	2	13	0	0%	13	13	118%
2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	13	0	0%	13	13	118%
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	0	0	0%	0	0	100%
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100	100	100%	100%	100%	2	100	100%
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	70	19	27%	70	100	100%
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	3	3	3	3	100%	3	3	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)	Perkiraan realisasi capaian Target Rensstra s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2025(%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
						Air dan Listrik yang Disediakan								
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	141	183	118	58	49%	129	118	100%
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100%	1	1	100%
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44	44	39	39	100%	39	39	89%
2	11	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4	2	4	3	75%	4	4	100%
2	11	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	5	5	0	0%	5	5	100%
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatn dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	1	1	1	0	0%	1	1	100%
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	4	2	0	0%	2	2	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)	Perkiraan realisasi capaian Target Rensstra s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2025(%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75	65	50	12	24%	50	50	67%
2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	11	16	3	19%	16	16	100%
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha yang taat persyaratan pengendalian pencemaran lingkungan	19	19	20	0	0%	20	20	105%
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	4	4	4	-	0%	4	4	100%
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3	3	3	-	0%	3	3	100%
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	1	-	0%	1	1	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)	Perkiraan realisasi capaian Target Rensstra s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2025(%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup yang disusun	4	13	5	0	0%	5	5	125%
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4	13	5	0	0%	5	5	125%
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan tutupan lahan perkotaan	40	32,39	49,52	0	0%	49,52	49,52	124%
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas RTH perkotaan	40	32,39	49,52	0	0%	49,52	49,52	124%
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	708,636	708,636	708,336	39,178	5,53%	708,336	708,336	100%
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan limbah B3	90	88	90	11	12%	90	90	100%
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Usaha yang memiliki ijin B3	46	39,63	46	6	0	46	46	1

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)	Perkiraan realisasi capaian Target Rensstra s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capain (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2025(%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	75	65	75	10	13%	75	75	100%
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Penurunan pelanggaran terhadap izin PPLH	24%	32%	23%	4	17%	23%	23%	96%
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20	40	20	4	20%	20	20	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)	Perkiraan realisasi capaian Target Rensstra s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2025(%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20	40	20	4	20%	20	20	100%
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan	14,29%	16,67%	12,5%	0	21%	12,5%	12,5%	87%
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penghargaan Lingkungan hidup yang diperoleh	100%	100%	100%	0	21%	100%	100%	100%
2	11	09	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	30	83	30	0	23%	30	30	100%
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	39,15	36,71	39,15	10,09	26%	39,15	39,15	100%
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	94,96%	91,710	94,80	25,00	26%	94,80%	94,80%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Subkegiatan (suboutput)	Target Kinerja Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (Perkiraan realisasi kinerja Renja 2025)	Perkiraan realisasi capaian Target Rensstra s/d Tahun 2025	
									Target Renja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capain (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2025(%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+9)	11=(10/4)
2	11	1	2.0	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	180	234	234	234	130%	234	234	130%
2	11	1	2.0	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	366.593	228.850	366.593	91.648	25%	366.593	366.593	100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025

Tabel 2.2

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target RPJMD (s.d. 2026)	2024		2025 s.d triwulan 1						2026		Perkiraan realisasi s.d. 2026		Sub Kegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16+18	19
3	PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH						2.779.126.175		6.621.694.200		813.699.000				9.620.000.000			
a	Penataan taman/RTH dan PKL	luas RTH terbangun	Ha	5.011	5,011	1,9	2.427.032.275	5,011	2.431.925.000	1,9	134.510.000	38%	6%		3.500.000.000			2.11.04.2.01.05
2	Penataan Taman/ RTH	Rasio Tutupan Lahan	Angka	18,32	18,62	17,4	2.427.032.275	18,57	2.431.925.000	17,4	134.510.000	94%	6%					2.11.04.2.01.05
		Terbangunnya Pedestrian dan jalur hijau	Paket	-	4	0	0	-	-	-	-							
		Indeks Kualitas Lahan	Angka			32,39		49,52						49,6	3.500.000.000			2.11.04.2.01.05

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target RPJMD (s.d. 2026)	2024		2025 s.d triwulan 1						2026		Perkiraan realisasi s.d. 2026		Sub Kegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16+18	19
b	Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS)	Persentase timbulan sampah yang tertangani pada TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS	%	94,92	94,98	91,71	-	94,96	3.839.769.200	94,67	672.694.500	100%	18%	20	5.500.000.000			2.11.11.2.01.03
1	Pembangunan sarana prasarana persampahan	Tersedianya sarana prasarana penampung sampah (Kontainer)	Unit	43	16	15	-	10	3.839.769.200	2	672.694.500	20%	18%					2.11.11.2.01.03
2	Pembangunan TPS	Terbanggunnya TPS	Unit	-	4	0	0	-	-	-								2.11.11.2.01.04

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target RPJMD (s.d. 2026)	2024		2025 s.d triwulan 1						2026		Perkiraan realisasi s.d. 2026		Sub Kegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16+18	19
3	Pengelolaan sampah	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	-	4	17,88	-	18	-	-	-	-	-	20	5.500.000.000	-	-	2.11.11.2.01.04
c	Bank sampah	Terbentuknya Bank sampah	unit	91	80	20	192.387.100	20	200.000.000	2	6.494.500	10%	3%	20	220.000.000	-	-	2.11.11.2.01.04
1	Pembentukan bank sampah	Terbentuknya Bank sampah	unit	91	80	20	192.387.100	20	200.000.000	2	6.494.500	10%	3%	20	220.000.000	-	-	2.11.11.2.01.04
d	Gerakan kali bersih	Panjang sungai di wilayah perkotaan yang terjaga kebersihannya	km	-	12	1,95	159.706.800	1	150.000.000	-	-	0%	0%	2	400.000.000	-	-	2.11.03.2.01.01

N O	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target RPJMD (s.d. 2026)	2024		2025 s.d triwulan 1						2026		Perkiraan realisasi s.d. 2026		Sub Kegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16+18	19
1	Pelaksanaan bersih-bersih sungai	Terjaganya Kebersihan sungai dari gulma	Keg	-	16	0	99.706.800	1	100.000.000	-	-	0%	0%	2	200.000.000			2.11.03.2.01.01

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab Demak Ta 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan, Pembinaan Administrasi Dan Kesekretariatan Kepada Seluruh Unit Kerja Di Lingkungan Dinas; Dan
- e. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati, Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan renstra 2021- 2026, disesuaikan dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 yang disusun selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2025 pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Demak

NO	Indikator	IKU	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 tw 1	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kualitas Air (ANGKA)	V	-	V	32,05	32,10	32,15	32,20	55,61	n/a	73,17	73,27	Sesuaikan ba iklh
2	Indeks Pencemaran Udara (ANGKA)	V	-	V	82,35	82,38	82,41	82,44	72,53	n/a	84,55	84,56	
3	Indeks Tutupan Lahan (ANGKA)	V	-	V	25,9	26,2	26,5	26,80	32,39	n/a	49,52	49,53	
4	Persentase penurunan pencemaran udara (%)	V	-	V	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	n/a	0,02	0,02	
5	Persentase penurunan pencemaran air permukaan (%)	V	-	V	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	n/a	0,02	0,02	
6	Rasio Luas Tutupan Lahan (%)	V	-	V	18,47	18,52	18,57	18,62	14,37	n/a	21,97	21,97	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (ANGKA)	V	-	V	83,96	84,06	84,16	84,26	87,53	n/a	88,36	88,125	
8	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	V	-	V	100	100	100	100	100	n/a	100	100	
9	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup (NILAI)	V	-	V	77,75	78,65	79,67	80,02	77,20	n/a	80,02	80,02	
10	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target (%)	V	-	V	100	100	100	100	100	n/a	100	100	
1	Emisi GRK	V	-	V	1.354,80	1.354,72	1.354,64	1.354,56	1.470,37	n/a	224.790,77	1.193.525,74	
2	IKLH	V	-	V	66,26	66,28	66,31	66,34	57,38	n/a	72,60	72,64	

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Tahun Kab. Demak TA 2025

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak selama kurun waktu terakhir ini. Namun demikian pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya untuk pengendalian kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya pencemaran air, pencemaran udara, limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, limbah rumah tangga (limbah domestik), kerusakan lahan kritis, serta dampak perubahan iklim. Permasalahan lingkungan hidup pada masa sekarang masih akan dihadapkan pada persoalan persampahan. Diperlukan manajemen penanganan sampah yang baik, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat karena masih banyaknya buangan liar ataupun ceceran sampah di sepanjang jalan protokol, lahan kosong, sungai, jembatan dan tempat umum. Sehingga diperlukan suatu upaya/ solusi untuk menangani permasalahan sampah di Kabupaten Demak.

Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah untuk memformulasi dalam menanggapi isu-isu penting dalam memberikan rekomendasi dan catatan penting untuk ditindak lanjuti. Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan wajib lingkungan hidup dan sub urusan persampahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugasnya diantaranya :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui penataan dan penanganan kasus lingkungan hidup dengan dilakukannya penyidikan, penyusunan berkas perkara.
2. Terwujudnya peningkatan cakupan wilayah yang melaksanakan program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan seperti : pembangunan biogas, perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), hutan / taman kota.

3. Tersedia dan terpublikasinya data atau informasi pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui elektronik/ internet dalam web site <https://jari-satu.web.app> dan “dinlh.demakkab.go.id”.
4. Terwujudnya peningkatan jumlah sekolah Adiwiyata dan Program
5. Penanganan Kampung Iklim yang peduli dan berbudaya lingkungan di Kabupaten Demak.
6. Terwujudnya peningkatan kualitas air, udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk mencapai indikator :

1. Masih rendahnya capaian indikator indeks kualitas lingkungan hidup.
2. Pengelolaan persampahan belum optimal secara profesional dan komprehensif.
3. Responsivitas terhadap aduan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen Amdal dan UKL-UPL belum maksimal.

Beberapa isu prioritas lingkungan hidup lokal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Penurunan kualitas air tanah dan cadangan air tanah sebagai sumber air minum bagi penduduk serta meningkatnya pencemaran sungai oleh limbah domestik (rumah tangga) dan limbah industri. Kualitas air tanah dan air permukaan mengalami penurunan, terutama di wilayah perkotaan dan diperkirakan akan terus mengalami ancaman pencemaran seiring terus bertambahnya jumlah penduduk dan usaha/kegiatan
2. Pencemaran udara terutama terjadi di wilayah perkotaan dan industri yang ditunjukkan meningkatnya polutan udara seperti CO, NO₂, HC dan partikulat sebagai akibat meningkatnya usaha/kegiatan masyarakat selain juga karena bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan jumlah industri menjadi penyebab memburuknya kualitas udara, disamping keterbatasan ruang terbuka hijau/jalur hijau.
3. Terbatasnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan

serta terbatasnya pemahaman terhadap kualitas lingkungan menyebabkan percontohan/demplot tentang pengelolaan lingkungan belum berkembang sesuai harapan.

4. Tingginya lahan kritis akibat penatagunaan lahan yang tidak sesuai kaidah konservasi serta berkurangnya daerah resapan air di daerah hulu mengakibatkan erosi dan sedimentasi, sehingga pada musim penghujan mengakibatkan banjir di daerah hilir.
5. Meningkatnya produksi sampah dan limbah B3, baik sampah rumah tangga maupun sampah usaha/kegiatan, namun belum dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Masih adanya masyarakat Kabupaten Demak yang belum mendapatkan pelayanan sampah (pengangkutan dari rumah tangga ke TPS/TPA).
7. Belum optimalnya penataan Ruang Terbuka Hijau terutama RTH publik.

Dengan menganalisis hambatan yang dimiliki, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak menemukan isu-isu strategis yang harus ditangani sebagai berikut:

- 1) Semakin meningkatnya sumber pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industri, rumah sakit, transportasi, dan pertokoan sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran baik air, tanah, maupun udara yang melibatkan kerjasama semua pemangku kepentingan.
- 2) Banyak industri kecil (seperti industri tahu, batik, dan makanan) yang sangat berpotensi mencemari lingkungan tapi tidak bisa memenuhi persyaratan teknis dan pembiayaan pembuatan IPAL.
- 3) Belum adanya pejabat fungsional PPLHD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 5) Masih kurang memadainya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas yang belum sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup.

2.4 Review terhadap Renja 2025

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tahun 2025 terdapat 7 Program, 15 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan pagu Rp. 25.225.208.300.- dengan penjabaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp.17.552.283.300,00 dan Urusan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 7.672.925.000,00,-. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tahun 2021-2026. Untuk mencapai visi tersebut terdapat 3 misi dan renja Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan guna mendukung misi kedua yaitu **Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas dan Berdaya Saing**. Selain itu, Renja Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk mendukung program unggulan Bupati Demak Visi Kabupaten Demak yaitu **Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera**. Selain itu, Renja Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk mendukung program unggulan Bupati Demak yaitu:

1. Peningkat kebersihan dan keindahan wilayah.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama di Kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi.

Tabel 2.4
Review terhadap Renja tahun 2025
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				25.225.208.300	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				30.304.823.300	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100	17.552.283.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100	18.697.138.300	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	9	8.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	9	8.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH Kab Demak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLH Kab Demak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2.000.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH Kab Demak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DLH Kab Demak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DLH Kab Demak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DLH Kab Demak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH Kab Demak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DLH Kab Demak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	2.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	1	14.920.208.300	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	1	14.920.208.300	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH Kab Demak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	11.697.801.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLH Kab Demak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	11.697.801.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLH Kab Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	3.222.407.300	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DLH Kab Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	3.222.407.300	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	1	2.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	1	2.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DLH Kab Demak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	2.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DLH Kab Demak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	2.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	506.800.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	474.240.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jawa Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	270	506.800.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jawa Barat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	248	474.240.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	334.355.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	339.375.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH Kab Demak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLH Kab Demak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	8.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH Kab Demak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	70.725.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLH Kab Demak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	70.725.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DLH Kab Demak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DLH Kab Demak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DLH Kab Demak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	30.250.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DLH Kab Demak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	30.250.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DLH Kab Demak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DLH Kab Demak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	6.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH Kab Demak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	3.780.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DLH Kab Demak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	3.780.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH Kab Demak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	175.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLH Kab Demak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	180.020.000	Lembur dan koordinasi

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DLH Kab Demak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DLH Kab Demak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DLH Kab Demak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	33.600.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DLH Kab Demak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	33.600.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang diadakan	13	167.075.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang diadakan	34	451.822.500	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH Kab Demak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	167.075.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH Kab Demak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32	435.822.500	Pengadaan 4 unit pc, 5 unit printer (@3.500.000) , 3 unit printer (@ 2.500.000) dan 4 unit laptop, 2 unit sound portabel , 1 unit TV 85 ' unit pc, 4 unit printer dan 5 unit laptop
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH Kab Demak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	16.000.000	Pengadaan AC 2 unit

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100	507.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100	510.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH Kab Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70	7.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLH Kab Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	10.000.000	Pengadaan materai 300 buah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH Kab Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLH Kab Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	500.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang terpelihara	118	1.106.845.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang terpelihara	129	1.991.492.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH Kab Demak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	114.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DLH Kab Demak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	114.950.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLH Kab Demak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39	682.560.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLH Kab Demak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	1.013.300.000	Bertambah untuk 5 unit pemeliharaan roda 4, 4 unit pemel kend roda 6, 2 unit pemel ken d roda 2

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DLH Kab Demak	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DLH Kab Demak	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4	600.000.000	Pemeliharaan alat berat yang tersedia saat ini baru sebagian
	Pemeliharaan Mebel	DLH Kab Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	1.000.000	Pemeliharaan Mebel	DLH Kab Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	3.257.500	Pengadaan kaca meja dan karpet
	Pemeliharaan Peralatn dan Mesin Lainnya	DLH Kab Demak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	1	10.075.000	Pemeliharaan Peralatn dan Mesin Lainnya	DLH Kab Demak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	1	10.075.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLH Kab Demak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	3.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DLH Kab Demak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	201.000.000	Rehabilitasi atap dan bangunan kantor
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH Kab Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50	35.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH Kab Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50	39.150.000	Tambah pemeliharaan komputer/laptop 5 unit

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH Kab Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	9.760.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLH Kab Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	9.760.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase usaha yang taat persyaratan pengendalian pencemaran lingkungan	20	670.885.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase usaha yang taat persyaratan pengendalian pencemaran lingkungan	20	995.885.000	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	4	500.000.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	4	535.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	3	450.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	3	470.000.000	Pembinaan terhadap perusahaan peserta proper

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	1	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	1	65.000.000	Pembinaan Kampung Proklam
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	1	170.885.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	1	460.885.000	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	1	170.885.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	5	460.885.000	Penyusunan dokumen IKLH, GRK, Penyusunan Database RTH Perkotaan dan penambahn untuk KLHSRTRW 100 Juta
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	49,52	2.431.925.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	36,20	3.041.685.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	49,52	2.431.925.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	36,20	3.041.685.000	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	708,636	2.431.925.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	708,636	3.041.685.000	Pembuatan pagar taman, pengadaan mesin pemotong rumput dorong 4 unit dan Pemeliharaan lampu
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	92	57.345.800	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	92	57.345.800	
	Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	45,73	57.345.800	Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	45,73	57.345.800	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	75	57.345.800	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	75	57.345.800	Pembinaan terhadap pelaku usaha dan fasyankes
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	23	138.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	23	138.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	20	138.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	20	138.000.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	20	138.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	20	138.000.000	Uji kualitas air limbah pada pelaku usaha/ fasyankes
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	12,5	50.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	12,5	50.000.000	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	100	50.000.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	100	50.000.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	30	50.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	30	50.000.000	Pembinaan sekolah adiwiyata
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	40,35	4.324.769.200	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	40,35	7.324.769.200	
	Pengelolaan Sampah		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	94,80	4.324.769.200	Pengelolaan Sampah		Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	94,80	7.324.769.200	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	180	485.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	180	485.000.000	Pembinaan Bank sampah

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	366.594	3.839.769.200	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	DLH Kab Demak	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	366.595	6.839.769.200	Padas 138.159.200, BBM 650.881.700, Sepatu Lapangan (Petugas Kebersihan) 13.725.000, Kertas Bufalo 450.000, Cetak MMT - 743.000, Fotocopy - 1.319.000, Saber - 540.000.000, THL - 3.075.000, Lembur gol I/II 17.595.000, Lembur gol III 9.000.000, Lembur gol IV - 7.500.000, Sewa Kendaraan Luar Provinsi 6.400.000, Sewa Kendaraan Jateng&DIY 6.000.000, Jasa Konsultasi Perencanaan (Kebunbatur) - 7.500.000, Pemeliharaan

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Kontainer 83.250.000, Dinas Luar Jakarta 26.500.000, Dinas Luar Jawa Tengah 16.650.000, Dinas Dalam (kegiatan) 5.400.000, Dinas Dalam (pendampingan TPS3R 7.500.000), Belanja Kontainer sampah 600.000.000, Belanja Gerobak Sampah 90.000.000, Penyusunan Masterplane Persampahan 100.000.000, Belanja Truck Armroll 870.000.000, Belanja Dump Truck 992.126.100

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kab Demak Ta 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang Desa yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja SKPD Desa.
- b. Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh warga Desa yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga di Desa setempat.
- c. Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan Desa sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah.
- d. Prioritas kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD provinsi.
- e. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan yang ada di Desanya di forum musrenbang kecamatan.

Hasil Musrenbang RKP-Desa tersebut kemudian dimusyawarahkan dalam Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, untuk selanjutnya hasil dari Musrenbang tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten. Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Tahun 2025 seperti nampak pada tabel 2.5 berikut ini

Tabel 2,5
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Demak Tahun 2026
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

RENJA 2025					PERUBAHAN RENJA 2025			
No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Hibah Kepada Perkumpulan Pelestari Mangrove Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung	Desa Kedungmutih kec. Wedung Kab Demak	Bertambahnya Luasan Mangrove di Desa Kedungmutih kec. Wedung Kab. Demak	1 paket	Penanaman Mangrove di Desa Kedungmutih kec. Wedung Kab Demak	Desa Kedungmutih kec. Wedung Kab Demak	Bertambahnya Luasan Mangrove di Desa Kedungmutih kec. Wedung Kab. Demak	1 paket
2				1 Paket	Penyusunan dokumen DED Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang	Tersedianya dokumen DED Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Bonang	1 Paket
3				1 paket	Penyusunan dokumen DED Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Wedung	Kecamatan Wedung	Tersedianya dokumen DED Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Wedung	1 paket
4				1 Paket	Program Penyusunan Kajian Penanganan Sampah Pesisir Kecamatan Bonang	Kecamatan Bonang	Tersedianya dokumen Kajian Penanganan Sampah Pesisir Kecamatan Bonang	1 Paket

RENJA 2025					PERUBAHAN RENJA 2025			
No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
1	2	3	4	5	7	8	9	10
5				1 paket	Program Penyusunan Kajian Penanganan Sampah Pesisir Kecamatan Wedung	Kecamatan Wedung	Tersedianya dokumen Kajian Penanganan Sampah Pesisir Kecamatan Wedung	1 paket
6	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KAB DEMAK		Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan	1 Paket	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KAB DEMAK	Jawa Timur	Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan	1 Paket
7	PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU PADA BANK SAMPAH SANTOSO MANDIRI RW 30 DESA BATURSARI KEC MRANGGEN		Tersedianya bangunan Bank Sampah	1 Paket	PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU PADA BANK SAMPAH SANTOSO MANDIRI RW 30 DESA BATURSARI KEC MRANGGEN	DESA BATURSARI KEC MRANGGEN	Tersedianya bangunan Bank Sampah	1 Paket
8	BANTUAN SARPRAS RTH DAPIL 1				DIHAPUS			

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kab Demak Ta 2025

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyusun arah kebijakan pembangunan nasional dalam dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, botton up dan top down.

Untuk periode 2025-2029, arah kebijakan pembangunan nasional dituangkan dalam RPJMN sebagai penjabaran dari visi Presiden periode 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini dicapai melalui 8 (delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita antara lain:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

RPJMN 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan tahap awal dari empat tahapan yang dirancang untuk mewujudkan visi jangka panjang. Fokus arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 adalah penguatan transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; kesinambungan pembangunan.

Tema pembangunan Kabupaten Demak tahun 2025 yaitu Peningkatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Prioritas pembangunan Kabupaten Demak tahun 2025 dirumuskan dalam rangka pencapaian visi “Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026 dan memperhatikan Program Unggulan Bupati terpilih periode 2025-2029. Prioritas pembangunan Kabupaten Demak tahun 2026 sesuai RPJMD tahun 2021-2026 yaitu:

1. Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama;
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city;
3. Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah;
4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
5. Pengembangan inovasi daerah;
6. Perluasan kawasan perkotaan;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi;
8. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat;
9. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Untuk program unggulan Kepala Daerah terpilih 2025-2029 yaitu:

1. Demak Cerdas dan Berkarakter
2. Demak Religius
3. Demak Produktif dan Mandiri
4. Demak *Smart Governance*
5. Demak Mantap
6. Demak Tangguh dan Lestari

Dalam penyusunan perubahan Renja tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak melakukan telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Kementerian/Lembaga teknis terkait dan juga sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 menempatkan pengembangan SDM dan reformasi birokrasi sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), perbaikan pengelolaan persampahan, serta peningkatan luasan tutupan lahan menjadi pilar strategis dalam menciptakan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan arah kebijakan tersebut diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam melaksanakan kegiatan dapat berkontribusi dalam mendukung transformasi birokrasi dan Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sinergi antara kebijakan nasional dan perencanaan pembangunan daerah akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan Indonesia maju, menuju Indonesia Emas 2045.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, dimana dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 pasal 3 ayat 1 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan

pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sehingga Renja dan Renstra merupakan bentuk pelaksanaan teknis OPD sesuai tugas dan fungsi dengan mengacu pada visi dan misi Kepala.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yaitu **“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”** dan dalam mewujudkan visinya ditetapkan 3 misi antara lain **(1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya, (2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (3) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran.** Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam mengemban fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup ikut berperan dalam mendukung **Misi ke-2** Bupati Demak yaitu **Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing.**

Adapun tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak pada Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak adalah:

1. Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif
3. Menurunnya Pencemaran Udara
4. Meningkatnya Luas Tutupan Laha (LTH)
5. Menurunnya Pencemaran Air Permukaan

Tabel 3.1
Target Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Uraian	Indikator	Realisasi		TARGET		
		2024	2025 TW 1	RPJMD pada tahun 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan 1 : Meningkatkan pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,50	n/a	88,795	87,30	88,36
Sasaran 1.1 : Terwujudnya Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	n/a	100	100	100
Tujuan 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	77,20	n/a	79,67	80,02	80,02
Sasaran 2.1.: Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	n/a	100	100	100
Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	55,61	n/a	32,15	73,17	73,17
	Indeks Pencemaran Udara	72,53	n/a	82,41	84,55	84,55
	Indeks Tutupan Lahan	32,39	n/a	26,5	49,52	49,52
Sasaran 3.1: Menurunnya pencemaran udara	Persentase penurunan pencemaran udara	0,02	n/a	0,02	0,02	0,02
Sasaran 3.2 : Menurunnya pencemaran Air Permukaan	Persentase penurunan pencemaran air permukaan	0,02	n/a	0,02	0,02	0,02
Sasaran 3.3 : Meningkatnya Luas Tutupan Lahan (LTH)	Rasio Luas Tutupan Lahan	18,42	n/a	18,57	19,74	21,97

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2025

Pengukuran tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan sebagai bahan pertimbangan digunakan:

- a. Peraturan Bupati Demak Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak;
- b. Visi, Misi dan program unggulan Bupati dan wakil Bupati terpilih yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Demak.
- c. Cascading Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak telah disesuaikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum di dalam Cascading Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Guna mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tersebut diatas maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak pada APBD Tahun 2025 melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan 7 (tujuh) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar

Rp25.225.208.300,- Pagu anggaran yang bersumber dari Dana alokasi umum.

Pada RKPD perubahan tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak pada APBD Tahun 2025 melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan 7 (tujuh) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp25.243.954.024,- bertambah Rp329.865.724,-.

Rumusan program, kegiatan dan subkegiatan diatas telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, tetapi pagu indikatif mengalami perubahan penurunan atau kenaikan pada masing masing program, kegiatan dan subkegiatan.

Adapun rencana Program, kegiatan dan subkegiatan beserta tolak ukur kinerja dan pagu indikatif dapat diuraikan secara detail pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergerakan Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergerakan Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	15
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASA												
	2	1	1			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						23.965.623.300	24.914.088.300	25.243.954.024	329.865.724			
1	2	1	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Persentase	100	100	100	16.192.698.300	17.426.743.300	16.641.540.524	-785.202.776			
	2	1	0	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	9	9	9	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-			
	2	1	0	1	2.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	3	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DAU		DINLH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	15
	2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DAU		DINLH
	2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DAU		DINLH
	2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	4	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DAU		DINLH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	15
	2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	1	1	1	13.560.623.300	14.920.208.300	13.898.975.761	(1.021.232.539)			
	2	1	0	2.0	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	100	100	100	10.338.216.000	11.697.801.000	10.749.416.724	(948.384.276)	DAU		DINLH
	2	1	0	2.0	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	3.222.407.300	3.222.407.300	3.149.559.037	(72.848.263)	DAU		DINLH
	2	1	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	Laporan	1	1	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-			
	2	1	0	2.0	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DAU		DINLH
	2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	100	100	506.800.000	474.240.000	474.240.000	-			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	15
	2	1	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	270	270	248	506.800.000	474.240.000	474.240.000	-	DAU		DINLH
	2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	100	100	100	334.355.000	241.375.000	247.142.000	5.767.000			
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	20	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	DAU		DINLH
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	30	30	70.725.000	70.725.000	65.793.000	(4.932.000)	DAU		DINLH
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	25	25	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	DAU		DINLH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	15
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	4	30.250.000	30.250.000	30.250.000	-	DAU		DINLH
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	3	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	DAU		DINLH
	2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	5	5	3.780.000	3.780.000	3.780.000	-	DAU		DINLH
	2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	200	200	200	175.000.000	82.020.000	92.719.000	10.699.000	DAU	Lembur dan koordinasi	DINLH
	2	1	0	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	2	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	DAU		DINLH
	2	1	0	2.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	Dokumen	2	2	1	33.600.000	33.600.000	33.600.000	-	DAU		DINLH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	15
						Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
	2	1	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	13	13	15	167.075.000	167.075.000	182.400.000	15.325.000			
	2	1	0	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	13	9	167.075.000	167.075.000	178.800.000	11.725.000	DAU	Pengadaan 4 unit pc, 4 unit printer dan 5 unit laptop	DINLH
	2	1	0	2.0	05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	6	-	-	3.600.000	3.600.000		Pe	
	2	1	0	2.0	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unii	0	0	0	-	-	-	-	DAU	Pengadaan AC 2 unit	DINLH

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	15
	2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Persentase	100	100	100	507.000.000	507.000.000	381.000.000	(126.000.000)			
	2	1	0	2.0	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	70	70	100	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	DAU		DINLH
	2	1	0	2.0	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	500.000.000	500.000.000	374.000.000	(126.000.000)	DAU		DINLH
	2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	Unit	118	118	118	1.106.845.000	1.106.845.000	1.447.782.763	340.937.763			
	2	1	0	2.0	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	1	1	1	114.950.000	114.950.000	114.950.000	-	DAU		DINLH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	15
						Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya											
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	39	39	39	682.560.000	682.560.000	705.065.028	22.505.028	DAU	Pemeliharaan kendaraan lapangan yang tersedia saat ini belum maksimal	DINLH
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	4	4	4	250.000.000	250.000.000	550.000.000	300.000.000	DAU	Pemeliharaan alat berat yang tersedia saat ini belum maksimal	DINLH
	2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5	5	1.000.000	1.000.000	3.257.500	2.257.500	DAU	Pengadaan kaca meja dan karpet	DINLH
	2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatn dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Unit	1	1	1	10.075.000	10.075.000	10.075.000	-	DAU		DINLH
	2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	2	2	2	3.000.000	3.000.000	19.175.235	16.175.235	DAU	Rehabilitasi atap dan bangunan kantor	DINLH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	15
							Dipelihara/Direhabilitasi											
	2	1	0	2.0	0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	50	50	35.500.000	35.500.000	35.500.000	-	DAU		DINLH
2	2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha yang taat persyaratan pengendalian pencemaran lingkungan	Persentase	20	20	20	550.000.000	591.425.000	811.425.000	220.000.000			
	2	1	0	2.0		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Dokumen	4	4	4	500.000.000	433.490.000	433.490.000	-			
	2	1	0	2.0	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Dokumen	3	3	3	450.000.000	397.670.000	397.670.000	-	DAU	Pembinaan terhadap perusahaan peserta proper	DINLH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	15
						Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	hidup disusun											
	2	1	0	2.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Dokumen	1	1	1	50.000.000	35.820.000	35.820.000	-	DAU		DINLH
	2	1	0	2.0		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Dokumen	1	1	1	50.000.000	157.935.000	377.935.000	220.000.000			
	2	1	0	2.0	000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Laporan	1	1	5	50.000.000	157.935.000	377.935.000	220.000.000	DAU	Penyusunan dokumen IKLH, GRK, Penyusunan Database RTH Perkotaan	DINLH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	15
3	2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Angka	49,52	49,52	36,20	2.331.925.000	2.541.685.000	2.941.685.000	400.000.000			
	2	1	0	2.0		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Angka	49,52	49,52	36,20	2.331.925.000	2.541.685.000	2.941.685.000	400.000.000			
	2	1	0	2.0	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Ha	708,636	708,636	708,636	2.331.925.000	2.541.685.000	2.941.685.000	400.000.000	PAJAK AIR TANAH	Pembuatan pagar taman dan Pemeliharaan lampu	DINLH
3	2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase	92	92	92	25.000.000	44.805.800	18.360.000	(26.445.800)			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	15
						BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	hidup disusun											
4	2	1	0	2.0		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Persentase	45,73	45,73	45,73	25.000.000	44.805.800	18.360.000	(26.445.800)			
	2	1	0	2.0	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Laporan	75	75	75	25.000.000	44.805.800	18.360.000	(26.445.800)	DAU		DINLH
5	2	1	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Persentase	23	23	23	86.000.000	68.080.000	46.680.000	(21.400.000)			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	15
						LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)												
	2	1	0	2.0		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Dokumen	20	20	20	86.000.000	68.080.000	46.680.000	(21.400.000)			
	2	1	0	2.0	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Badan usaha	20	20	20	86.000.000	68.080.000	46.680.000	(21.400.000)	DAU		DINLH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	15
						Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												
6	2	1	0			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Persentase	12,5	12,5	12,5	50.000.000	35.810.000	35.810.000	-			
	2	1	0	2.0		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Persentase	100	100	100	50.000.000	35.810.000	35.810.000	-			
	2	1	0	2.0	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Entitas	30	30	30	50.000.000	35.810.000	35.810.000	-	DAU		DINLH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergerakan Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	15
						Pengelolaan Lingkungan Hidup												
7	2	1	1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Persentase	40,35	40,35	40,35	4.730.000.000	4.205.539.200	4.748.453.500	542.914.300			
	2	1	1	2.0		Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Persentase	94,80	94,80	94,80	4.730.000.000	4.205.539.200	4.748.453.500	542.914.300			
	2	1	1	2.0	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Kelompok	180	180	180	685.000.000	439.270.000	439.270.000	-	DAU		DINLH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET			ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Alasan Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan	RKPD	APBD Pergeseran Terakhir	RKPD Perubahan				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	13	14	15
	2	1	1	2.0	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disusun	Ton	366.593	366.594	366.595	4.045.000.000	3.766.269.200	4.309.183.500	542.914.300	DAU	Pengelolaan Persampahan	DINLH

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kab Demak TA 2025

4.2 Program Prioritas dan Rencana Implementasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak membidangi Urusan Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Dalam menunjang program prioritas Bupati Demak tahun 2026 pada Program Peningkatan Kebersihan Dan Keindahan Wilayah.

Program Pembangunan daerah Kabupaten Demak disusun dengan dasar pada program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026. Secara ringkas program unggulan pembangunan daerah yang akan mendukung masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan harmonisasi dan fasilitas kehidupan beragama;
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis “Smart City”;
3. Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah;
4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
5. Pengembangan inovasi daerah;
6. Perluasan Kawasan perkotaan;
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Terutama Di Kawasan Pesisir, Pertanian Dan Pusat Pertumbuhan/ Pusat Produksi;
8. Percepatan pemulihan ekonomi Masyarakat;
9. Peningkatan keberdayaan perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Program unggulan yang diambil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak adalah **“Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah”**.

Tahun 2026 Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak mendukung program unggulan peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah melalui Penataan Taman/ RTH dan PKL, Pengelolaan sampah terpadu TPS-3R/TPST, Bank Sampah dan gerakan kali bersih.

Dalam rangka mendukung program unggulan Bupati, kami Dinas Lingkungan Hidup melakukan penataan kembali Taman/ RTH untuk menambah keindahan kota disepanjang jalan Sultan Fatah sampai dengan alun alun kota.

Target Pengelolaan sampah terpadu TPS-3R/TPST sebanyak 3 unit, Bank Sampah 20 unit Gerakan Kali bersih sebanyak 1 Kegiatan rencana program prioritas dan rencana implementasi sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2026 sesuai Renstra PD Tahun 2021-2026

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2025 TW 1		TARGET 2025		TARGET 2026		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH		Ha	5.011	6,755	5.014.920.625	5.011	2.431.925.000	5,001	3.500.000.000	5,011		
1	Penataan taman/RTH dan PKL	luas RTH terbangun	Ha	5.011	6,755	4.427.032.275	5.011	2.431.925.000	5,011	3.500.000.000	5,011		
	Penataan Taman/ RTH	Rasio Tutupan Lahan	Angka	18,32	17,40	4.427.032.275	18,57	2.431.925.000	18,62	3.500.000.000	18,62	2.11.04.2.01.05	
2	Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS)	Persentase timbulan sampah yang tertangani pada TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS	%	94,92	91,71	8.913.462.624	94,96	3.839.769.200	94,98	5.500.000.000	94,98		
	Pembangunan sarana prasarana persampahan	Tersedianya sarana prasarana penampung sampah (Kontainer)	Unit	43	34	7.424.566.624	10	3.839.769.200	10	5.500.000.000	64	2.11.11.2.01.20	
3	Bank sampah	Terbentuknya Bank sampah	unit	91	234	916.896.000	20	200.000.000	20	200.000.000	294		

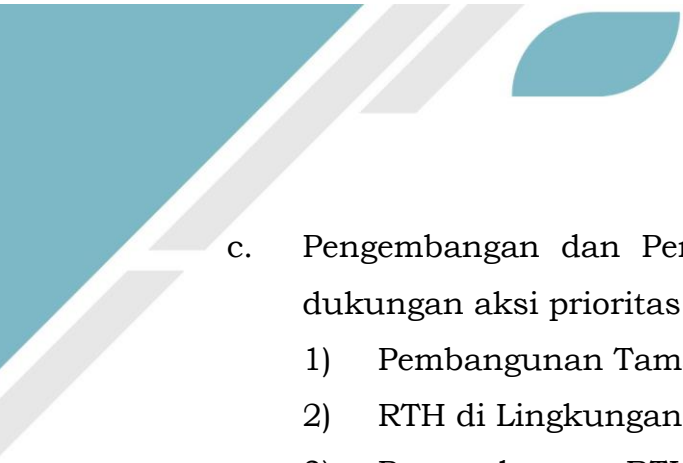
NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2025 TW 1		TARGET 2025		TARGET 2026		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pembentukan bank sampah	Terbentuknya Bank sampah	unit	91	234	686.977.900	20	200.000.000	20	200.000.000	294	2.11.11.2.01.04	
4	Gerakan kali bersih	Panjang sungai di wilayah perkotaan yang terjaga kebersihannya	km	-	9,75	538.255.800	1	100.000.000	1	100.000.000	5		
	Pelaksanaan bersih-bersih sungai	Terjaganya Kebersihan sungai dari gulma	Keg	-	4	538.255.800	1	100.000.000	1	100.000.000	5	2.11.03.2.01.01	

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kab Demak Ta 2025

Selain mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak 2021-2026, pelaksanaan program prioritas juga memperhatikan Program Unggulan Bupati periode 2025-2029. Program Unggulan Bupati terpilih 2025-2029 ada 6 (enam) Program Unggulan, yaitu (1) Demak Cerdas dan Berkarakter, (2) Demak Religius, (3) Demak Produktif dan Mandiri, (4) Demak Smart Governance, (5) Demak Mantap, (6) Demak Tangguh dan Lestari. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak merencanakan berkontribusi dalam perwujudan Program Unggulan ke-5 Demak Mantap dan ke-6 Demak Tangguh dan Lesatari. Perwujudan dari program unggulan ke-5 Demak Mantap salah satunya Penataan Kawasan Perkotaan dan Penerangan Jalan Utama dan Penataan Kawasan Perkotaan “Tera Kota Demak”, dengan dukungan aksi prioritas (1) Penataan Ruang Kota dan Fasilitas Umum, (2) Pelibatan Masyarakat & Komunitas Kota (3) Monitoring & Smart Lighting System.

Sedangkan Perwujudan dari program unggulan ke-6 Demak Tangguh dan Lesatari ialah

- a. Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat, dengan dukungan aksi prioritas :
 - 1) Penguatan Infrastruktur TPST dan TPS 3R,
 - 2) Pendirian dan Revitalisasi Bank Sampah,
 - 3) Sosialisasi dan Edukasi Lingkungan Sekolah & Rumah,
 - 4) Kemitraan & Inovasi Pengolahan Sampah Ekonomis,
 - 5) Digitalisasi Sistem Pengelolaan Sampah,
 - 6) Festival Lingkungan & Apresiasi “Warga Resik”.
- b. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Penguatan Komunitas, dengan dukungan aksi prioritas :
 - 1) Penanaman dan Rehabilitasi Hutan Mangrove,
 - 2) Pembangunan Sabuk Pantai & Penahan Gelombang (Breakwater),
 - 3) Edukasi & Sekolah Pesisir untuk Anak dan Masyarakat,
 - 4) Penguatan Ekowisata dan Desa Wisata Mangrove,
 - 5) Monitoring dan Kajian Ekologi Pesisir.

- 
- c. Pengembangan dan Pemanfaatan RTH Publik & Edukatif, dengan dukungan aksi prioritas :
- 1) Pembangunan Taman Kota & Taman Edukasi
 - 2) RTH di Lingkungan Sekolah dan Fasilitas Publik
 - 3) Pengembangan RTH Inklusif & Ramah Anak
 - 4) Kampanye & Gerakan Adopsi Taman oleh Komunitas
 - 5) Monitoring, Evaluasi & Digitalisasi Peta RTH

Tabel rencana program prioritas dan rencana implementasi sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2026
sesuai Program Unggulan Bupati Periode 2025-2029

NO	Kegiatan Prioritas/ Aksi Prioritas	Indikator	Satua n	Data Awal 2024	Target										Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					2025		2026		2027		2028		2029		Kode	Subkegiatan
					Kinerj a	Anggaran	Kinerj a	Anggaran	Kinerj a	Anggaran	Kinerj a	Anggaran	Kinerj a	Anggaran		
PP5. MANTAP																
KP7. PENATAAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PENERANGAN JALAN UTAMA - “Demak Terang dan Tertata”																
KP7 a.	Penataan Kawasan Perkotaan dan Penerangan Jalan Utama	Jumlah kawasan perkotaan tertata dan terintegrasi	lokasi		2	423.150.000	1	500.000.000	1	600.000.000	3	600.000.000	1	600.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP1. Penataan Ruang Kota dan Fasilitas Umum	jumlah taman, trotoar, halte, lampu taman, kursi publik, drainase yang tertata	lokasi	18	7	100.000.000	-	-	7	200.000.000	7	300.000.000	7	300.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP4. Pelibatan Masyarakat & Komunitas Kota	jumlah komunitas aktif yang mengikuti gerakan Jumat Bersih, mural tematik, adopsi taman	kelompok	-	-	-	6	200.000.000	7	250.000.000	8	300.000.000	9	350.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP5. Monitoring & Smart Lighting System	jumlah koridor yang terintegrasi smart lighting (Sistem kontrol otomatis & dashboard pemantauan PJU)	titik	-	-	-	4	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
KP7 b.	Penataan Kawasan Perkotaan “Tera Kota Demak”	jumlah jalur pedestrian bergaya Majapahit-Islamic	km													

NO	Kegiatan Prioritas/ Aksi Prioritas	Indikator	Satuan	Data Awal 2024	Target										Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					2025		2026		2027		2028		2029		Kode	Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
		terbangun														
		jumlah taman dan RTH bertema Islam-Majapahit	lokasi		-	-	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
PP5. TANGGUH & LESTARI																
KP3. PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU – DEMAK RESIK																
KP3	Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat	Persentase Volume sampah rumah tangga dan pasar yang terolah (reduce-reuse-recycle)	%	17,88	17,79	1.150.994.400	17,71	1.500.000.000	17,37	1.500.000.000	17,20	1.500.000.000	17,03	1.500.000.000	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
		Jumlah bank sampah & TPST yang aktif	unit	8	8	172.170.000	8	-	8	50.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
		timbulan sampah per kapita	%	69,60	74,66	-	79,72	-	84,78	-	89,84	-	94,9	-	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
		Jumlah Keluarga aktif yang terlibat dalam pengelolaan dan pemilahan sampah	KK	411.522	428.022	-	444.522	-	461.022	-	477.522	-	494.022	-	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
	AP1. Penguatan Infrastruktur TPST dan TPS 3R	Jumlah Pembangunan TPST dan TPS 3R (Bangunan, alat press, motor sampah, bak kontainer, komposter)	unit	-	3	585.020.000	1	200.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
	AP2. Pendirian dan Revitalisasi Bank	Jumlah bank sampah desa yang aktif dan difasilitasi pengumpulan,	unit	8	8	-	8	-	8	50.000.000	8	100.000.000	9	150.000.000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

NO	Kegiatan Prioritas/ Aksi Prioritas	Indikator	Satuan	Data Awal 2024	Target										Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					2025		2026		2027		2028		2029		Kode	Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	Sampah	pengelolaan tabungan, pelatihan manajemen														
	AP3. Sosialisasi dan Edukasi Lingkungan Sekolah & Rumah	Jumlah Sekolah yang mengikuti sosialisasi dan edukasi lingkungan (Kegiatan 3R, lomba kebersihan, kurikulum sadar sampah)	sekolah	181	200	35.810.000	220	30.000.000	240	100.000.000	260	150.000.000	280	200.000.000	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Jumlah RW yang mengikuti sosialisasi dan edukasi lingkungan (Kegiatan 3R, lomba kebersihan, kurikulum sadar sampah)	RW	10	12	-	14	-	16	50.000.000	18	100.000.000	20	150.000.000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	AP4. Kemitraan & Inovasi Pengolahan Sampah Ekonomis	Jumlah komunitas/U MKM binaan Daur ulang plastik, sampah organik jadi pupuk, kreasi sampah digital	kelompok	3	5	-	7	12.000.000	9	14.000.000	11	16.000.000	13	18.000.000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	AP5. Digitalisasi Sistem Pengelolaan Sampah	Jumlah sistem digital yang aktif dan terintegrasi desa-kota (Aplikasi pelaporan TPS penuh, sistem insentif digital, dashboard)	aplikasi	1	1	-	1	-	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

NO	Kegiatan Prioritas/ Aksi Prioritas	Indikator	Satuan	Data Awal 2024	Target										Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					2025		2026		2027		2028		2029		Kode	Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	AP6. Festival Lingkungan & Apresiasi "Warga Resik"	Jumlah penerima penghargaan Anugerah RW bersih, lomba video edukasi, kampanye kreatif	orang	3	3	38.255.200	3	30.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
KP5. REHABILITASI KAWASAN PESISIR – DEMAK IJO ROYO-ROYO																
KP5	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Penguatan Komunitas	Luasan mangrove dan vegetasi pantai yang direhabilitasi	ha	-	0,68	30.000.000	4,00	200.000.000	4,00	200.000.000	4,00	200.000.000	4,00	200.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Jumlah kawasan pesisir yang ditata dan diproteksi	desa													
		jumlah Partisipasi kelompok masyarakat pesisir dalam rehabilitasi	kelompok	1	1	-	-	-	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Jumlah infrastruktur pelindung pesisir yang dibangun/rehabilitasi (breakwater, tambak hijau)	unit	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP1. Penanaman dan Rehabilitasi Hutan Mangrove	jumlah Bibit mangrove, pengayaan, zonasi, adopsi pohon yang tertanam	bibit	-	1.700	30.000.000	11.000	200.000.000	11.000	200.000.000	11.000	200.000.000	11.000	200.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP2. Pembangunan Sabuk Pantai &	jumlah pembangunan pelindung sabuk pantai dan penahan	unit		-	-	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

NO	Kegiatan Prioritas/ Aksi Prioritas	Indikator	Satuan	Data Awal 2024	Target										Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					2025		2026		2027		2028		2029		Kode	Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	Penahan Gelombang (Breakwater)	ombak (Batu groin, bambu apung, karung pasir, sabuk hijau)														
	AP3. Edukasi & Sekolah Pesisir untuk Anak dan Masyarakat	jumlah sekolah yang mengikuti edukasi Modul konservasi, kebencanaan, ekowisata, pemanfaatan limbah laut	sekolah		-	-	-	-	6	120.000.000	6	120.000.000	6	120.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		jumlah kelompok yang mengikuti edukasi Modul konservasi, kebencanaan, ekowisata, pemanfaatan limbah laut	kelompok		-	-	-	-	6	120.000.000	6	120.000.000	6	120.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP4. Penguatan Ekowisata dan Desa Wisata Mangrove	jumlah desa destinasi ekowisata aktif (Track mangrove, perahu wisata, produk olahan hasil pesisir)	desa				-	-	-	-	1	200.000.000	2	400.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP5. Monitoring dan Kajian Ekologi Pesisir	jumlah Kajian abrasi, sedimentasi, kualitas air & tanah	kajian				1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
KP6. PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) – DEMAK IJI ROYO-ROYO																
KP6	Pengembangan dan Pemanfaatan RTH Publik & Edukatif	Penambahan luas RTH kota/kabupaten	ha	-	1.791,576	318.361.900	2.090,172	247.950.000	2.388,768	300.000.000	2.687,364	350.000.000	2.985,960	450.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

NO	Kegiatan Prioritas/ Aksi Prioritas	Indikator	Satuan	Data Awal 2024	Target										Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					2025		2026		2027		2028		2029		Kode	Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
		Jumlah taman kota/desa yang dibangun/diperbarui	lokasi	-	2	387.996.000	2	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Persentase kecamatan yang memiliki taman publik minimal 1 titik	%		14,29	387.996.000	14,29	400.000.000	14,29	200.000.000	14,29	200.000.000	14,29	200.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		jumlah Partisipasi komunitas dalam perawatan dan pemanfaatan RTH	kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	AP1. Pembangunan Taman Kota & Taman Edukasi	jumlah taman kota dibangun/revitalisasi (Jalur pejalan kaki, gazebo, tanaman endemik, pencahayaan, toilet umum)	lokasi	-	-	-	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP2. RTH di Lingkungan Sekolah dan Fasilitas Publik	jumlah Taman sekolah, ruang terbuka puskesmas, kantor layanan, posyandu	lokasi	-	-	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP3. Pengembangan RTH Inklusif & Ramah Anak	jumlah RTH dengan akses difabel, permainan anak, papan edukasi lingkungan	lokasi	1	1	24.564.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	AP4. Kampanye & Gerakan Adopsi Taman	jumlah komunitas perawat taman, mural lingkungan, lomba taman	kelompok	-	-	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

NO	Kegiatan Prioritas/ Aksi Prioritas	Indikator	Satuan	Data Awal 2024	Target										Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					2025		2026		2027		2028		2029		Kode	Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	oleh Komunitas															
	AP5. Monitoring, Evaluasi & Digitalisasi Peta RTH	jumlah Dashboard (platform data) RTH aktif, peta interaktif publik	media		1	40.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

BAB V.

PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan Rencana Tahunan sebagai turunan dari Perencanaan Strategis (Renstra) yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja (Renja) memberikan gambaran yang lebih detail mengenai tujuan dan sasaran pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Perubahan tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak akan melaksanakan 7 (tujuh) Program, 15 (lima belas) Kegiatan, 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan harapan seluruh Program dan Kegiatan tersebut dapat direalisasi secara baik sesuai apa yang telah direncanakan.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 merupakan acuan bagi Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, masyarakat dan semua pelaku pembangunan dalam mencapai sinergitas pelaksanaan program pembangunan di Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025, sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, masyarakat dan semua pelaku pembangunan berkewajiban melaksanakan program - program Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan publik;
3. Pada Awal tahun anggaran 2025, Lingkungan Hidup Kabupaten Demak wajib melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2025, serta kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD Kabupaten Demak;
4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan

dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala setiap bulan kepada Bupati Demak melalui Bapperida Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

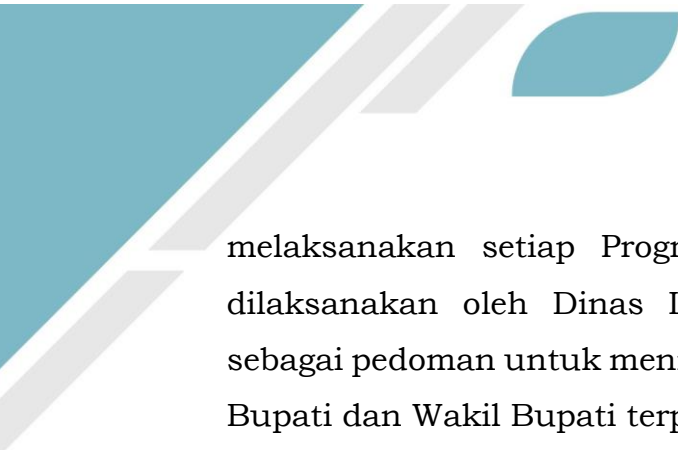
5.3 Rencana tindak lanjut.

Guna mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Demak yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan Perencanaan yang bersih, akuntabel, aspiratif, partisipatif, dan transparan, maka Dinas Lingkungan Hidup diharapkan untuk:

1. Bekerja keras serta berbenah diri, meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal;
2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi;
3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi;
4. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan;
5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi. Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rancangan akhir Perubahan Renja 2025 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

Keberhasilan Program dan Kegiatan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Demak bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup semata. Namun partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak senantiasa sangat kami harapkan baik di Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Forum Anak, masyarakat luas, Instansi/ Lembaga terkait dan stakeholder lainnya.

Dengan telah tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam



melaksanakan setiap Program dan kegiatan serta tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah menjadi Komitmennya.

Lampiran 1.

PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026
DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI,
KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
							Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%								Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%
							Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%								Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%
							Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%								Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	%	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	%
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit